

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Budiarto merumuskan bahwa partai politik merupakan sarana bagi warga negara dan partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai dan cita cita yang sama.<sup>2</sup> Dalam negara demokrasi, partai politik melakukan beberapa fungsi salah satunya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang bertujuan menumbuhkan kesadaran pentingnya politik. Tinggi dan rendah kesadaran politik warga negara juga dipengaruhi oleh kinerja partai politik sebagai pelaksana pendidikan politik.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik disebutkan fungsi dari partai politik yaitu pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1.

<sup>2</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008), Hal. 404.

<sup>3</sup> Wery Gumansyah. 2019. Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Tahun 2011 dan Hukum Islam. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol 4. No 2. Hal 177-192.

dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik menciptakan iklim yang kondusif bagi kesatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan politik juga menjadi penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara dan pendidikan politik menjadi proses rekrutmen politik dan pengisian jabatan politik melalui kesetaraan gender.<sup>4</sup>

Undang-undang di atas menyebutkan salah satu fungsi dari partai politik yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik pada undang-undang ini adalah proses pemahaman bagi warga negara agar sadar tentang arti penting dari politik bagi suatu bangsa. Oleh karena itu pendidikan politik ini sangat penting bagi warga negara. Dengan pendidikan politik ini diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi cerdas dalam perpolitikan dan dapat mengambil keputusan dengan baik dalam kontes demokrasi.

M. Nur Khoiron mengatakan bahwa pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. *Forming* mengandung makna bahwa pendidikan politik di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status dan kedudukan politiknya di tengah masyarakat, sedangkan *bildung* terkandung sebuah makna bahwa pendidikan politik adalah pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik.<sup>5</sup>

R. Hajer memandang pendidikan politik sebagai usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Selain itu pendidikan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>5</sup> Eko Handoyono dan Puji Lestari. Pendidikan Politik ( Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya) Hal 11

politik dipahami sebagai proses menggunakan kekuasaan untuk menegakan peraturan-peraturan dan keputusan di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Kartini Kartono mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian tujuan politik. Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono adalah proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dengan perinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.<sup>7</sup> Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono ialah mampu memahami situasi sosial politik, bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat.<sup>8</sup>

Pendidikan politik dari partai politik berfungsi sebagai meningkatkan hak dan kewajiban masyarakat berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik, meningkatkan kemandirian dalam membangun dan menjaga persatuan nasional. Pendidikan politik dapat membangun budaya politik etis yang sesuai dengan dasar negara yaitu pancasila. Partai politik melakukan pendidikan politik dengan harapan yaitu menjadi salah satu pendongkrak agar partisipasi masyarakat meningkat dalam kegiatan pemilihan umum.<sup>9</sup>

Selain itu pendidikan politik memiliki fungsi penting dalam dalam membentuk kualitas individu yang sadar terhadap hak dan kewajiban mereka di dunia politik dan partisipasi dalam pemilihan partisipasi yang tidak didasarkan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* halaman 12

<sup>7</sup> Kartini, Kartono 1989. *Pendidikan Politik* (Bandung : Penerbit Mandar Maju). Hal 57

<sup>8</sup> *Ibid* halaman 68

<sup>9</sup> I Gede Wijaya Kusuma, dkk. 2020. Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol 1. No 1. Hal 165.

dengan pendidikan akan memunculkan individu yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban untuk menentukan jalan demokrasi di negara mereka. Pendidikan politik membuat individu bertanggung jawab dan cerdas dalam merespon politik yang ada serta pendidikan politik harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali masalah politik yang belum terselesaikan.<sup>10</sup>

Bagi kader partai politik, pendidikan politik yang berfungsi untuk menyiapkan kader berkualitas yakni kader partai politik yang memiliki integritas, tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi kepada partai politiknya dan kepada negara Indonesia. Partai politik dan para legislator yang memiliki wewenang untuk merancang skema pendidikan yang berorientasi pada penumbuhan karakter dan nilai-nilai para kadernya. Partai politik bertanggung jawab terhadap tiga aspek kehidupan berpolitik yang sehat yakni memberikan wawasan yang memadai tentang pentingnya memperkuat kepribadian para kader dengan keterampilan mengelola emosi secara cerdas dan bertanggung jawab. Pendidikan politik bagi kader partai politik diharapkan membuat kader partai politik menjadi loyalitas, integritas dan tanggung jawab.<sup>11</sup>

Pada dasarnya pendidikan politik dapat dilakukan oleh semua lembaga yang mengatasnamakan pendidikan formal, tidak terkecuali dengan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia yang di dirikan oleh para ulama pada tempo dulu, ratusan tahun silam yang sampai saat ini masih eksis bahkan terus berkembang. Dalam dunia perpolitikan saat ini, pesantren banyak digunakan oleh elit-elit politik sebagai

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal 166

<sup>11</sup> Siti Rohmah dkk. 2019. Peran Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Kader Parpol Pada Partai Gerindra di Kabupaten Cianjur. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik Hukum dan Kewarganegaraan)*. Vol 9. No 2. Hal 1-11.

alat untuk memperoleh dukungan dalam pemilu. Dukungan kiai pesantren yang karismatik diperoleh dengan berbagai cara untuk menarik antusiasme masyarakat. Realitas yang demikian itu perlu dirubah dengan asumsi bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berpartisipasi di dunia politik. Berkaitan dengan hal itu, santri harus dibekali dengan ilmu politik yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik di lingkungan pesantren.<sup>12</sup>

Salah satu partai yang gencar dalam melaksanakan pendidikan politik berbasis pesantren adalah PKB, pendidikan politik berbasis pesantren yang dilaksanakan oleh PKB didasari oleh latar belakang lahirnya PKB dari tubuh NU. PKB lahir setelah era Orde Baru berakhir, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Ada yang mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik (parpol), mengusulkan nama parpol, lambang, hingga nama-nama pengurusnya. Tercatat, terdapat sekitar 39 usulan nama parpol, termasuk Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Karena PBNU dianggap belum bisa memenuhi keinginan masyarakat, sejumlah kalangan NU mulai mendeklarasikan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi masyarakat setempat.

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU, karena terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Oleh karena itu, Gus Dur bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis *ahlussunah wal jemaah*. Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan

---

<sup>12</sup> Ahmad Idris. 2015. Pendidikan Politik di Pondok Pesantren Al Karimimiyah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. *Skripsi* Universitas Muahammadiyah Malang.

deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri, dan KH A. Muchith Muzadi. Usai pembentukan partai dan pemilihan nama, maka tanggal 23 Juli 1998 deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilaksanakan di Jakarta. Pemilihan nama tersebut sesuai dengan sifat yang dijunjung dari parpol ini, yaitu kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis.<sup>13</sup> Hal ini yang menjadikan pesantren sebagai tempat pelaksanaan pendidikan politik oleh PKB.

PKB sendiri terlahir rahim kandungan NU, keberadaan pesantren merupakan aset politik kultural terpenting dimana pesantren yang menjadi basis dukungan NU oleh karena itulah, karakteristik budaya lokal pesantren turut mempengaruhi sikap dan perilaku kader PKB dalam berpolitik. Misalnya saja, pembukaan acara selalu diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al Quran. Pidato-pidato pimpinan partai selalu diawali dengan mukadimah berbahasa Arab sebagaimana lazimnya dalam forum pengajian pesantren untuk meningkatkan citra akseptabilitas, legitimasi sekaligus dukungan politik dari kalangan ulama terhadap kapasitas, posisi dan peran politik dari elite PKB tersebut. Pilihan pembacaan ayat al Quran tersebut juga harus sesuai dengan tradisi pesantren<sup>14</sup>.

Pelaksanaan pendidikan politik berbasis pesantren juga dilaksanakan oleh PKB di Kabupaten Padang Pariaman, PKB di Kabupaten Padang Pariaman dikutip dari Minangkabau.news PKB melakukan pendidikan politik berbasis pesantren dengan mengumpulkan pimpinan pondok pesantren untuk membahas UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang bertujuan untuk pengembangan pesantren kedepannya. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan

---

<sup>13</sup> <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/19/130000979/sejarah-berdirinya-partai-kebangkitan-bangsa-pkb?page=all> dikases tanggal 11 oktober 2022.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal 100

politik berbasis pesantren PKB di Kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan fungsinya sebagai partai politik yang baik sesuai dengan undang-undang. Peneliti berasumsi pendidikan politik berbasis pesantren yang dilakukan PKB telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga peneliti ingin mengetahui proses dalam pelaksanaan pendidikan politik berbasis pesantren yang diberikan.

Dari beberapa literatur yang penelitian baca, terdapat lima penelitian yang fokus tentang fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik. Pertama penelitian dari Sativa Camelia Putri Zaldy dan Sabir Maidin yang berjudul Fungsi Partai Dalam Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Pinrang. Pada penelitian ini dijelaskan salah satu bentuk pemberian pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik adalah memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait pasangan calon, visi-misi, serta menanyakan kebutuhan masyarakat. Selain memberikan pendidikan politik partai politik juga melakukan kaderisasi di tengah masyarakat dan mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan nasib bangsa kedepannya.<sup>15</sup>

Kedua penelitian dari Yulianto Dwi Saputro yang berjudul Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di DPD Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014). Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pendidikan Politik bagi partai Golkar Kota Malang merupakan prioritas utama, akan tetapi dalam pelaksanaannya pendidikan politik diberikan secara eksternal kepada masyarakat luas khususnya generasi muda masih bersifat pencitraan partai belaka. Selain itu pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa program kerja partai Golkar

---

<sup>15</sup>Satyva Camelia Putri Zaldy dan Sabir Maidin. 2020. Fungsi Partai Dalam Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Pinrang. *Siyatuna*. Vol 2. No 1. Hal 150-154.

tidak menjelaskan secara detail tentang filosofi pendidikan politik yaitu pola pikir kritis dan mandiri.<sup>16</sup>

Ketiga penelitian dari Dian Nugraheni yang berjudul Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tegal Pada penelitian ini dijelaskan bahwa bentuk pendidikan partai PDIP Kota Tegal bersifat formal dan informal. Pendidikan politik yang bersifat formal adalah dengan sasaran internal partai yaitu seperti, anggota, kader, pengurus dan petugas partai. Sedangkan pendidikan politik yang informal dengan sasaran internal partai dan masyarakat umum, bentuk pendidikan politik secara formal yaitu kaderisasi partai, sekolah partai dan konsolidasi Selain itu yang informal seperti seminar, bedah buku dan sarasehan politik.<sup>17</sup>

Keempat penelitian dari Payerli Pasaribu yang berjudul Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik pada penelitian ini dijelaskan bahwa partai politik memiliki suatu peranan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Selain itu partai politik harus mempunyai kader yang cerdas dan mempunyai wawasan yang cukup luas agar dapat memberikan pemahaman politik yang baik kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Kelima penelitian dari Abu Nawar Basyeban yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Pasca Dalam Memberikan Pendidikan Politik Berupa

---

<sup>16</sup>Yulianto Dwi Saputro. 2015. Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di DPD Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014). *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 1. No 21. Hal 34-42.

<sup>17</sup> Dian Nugraheni. 2017. Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tegal. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

<sup>18</sup>Payerli Pasaribu. 2017. Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol 5. No 1. Hal 51-59.

Wawasan Kebangsaan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa salah satu tugas partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi politik salah satu sarana sosialisasi politik adalah pendidikan politik, bentuk pendidikan politik dari partai politik salah satunya adalah penanaman wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan ini sangatlah penting karena dapat mencegah virus radikalisme yang mereusak kesatuan dan persatuan bangsa. Tugas ini bukan semata-mata tugas dari pemerintah tetapi juga tugas dari elemen bangsa salah satunya partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik.<sup>19</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah diteliti terdahulu seperti yang telah di jelaskan di atas. Pada penelitian ini peneliti akan membahas serta mengkaji fungsi dari pelaksanaan pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Padang Pariaman. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan fungsi pendidikan politik berbasis pesantren yang diberikan PKB di Kabupaten Padang Pariaman, serta dampak yang ditimbulkan kepada pesantren. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena pada umumnya pendidikan politik diberikan kepada masyarakat umum, berbeda dengan PKB di Kabupaten Padang Pariaman partai ini melaksanakan pendidikan politik berbasis pesantren.

## **1.2. Rumusan Masalah**

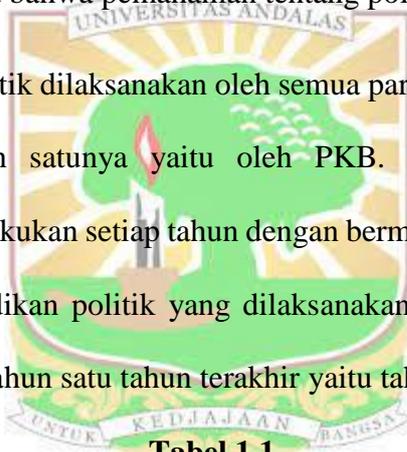
Pendidikan politik adalah salah satu hal yang wajib dilaksanakan oleh partai politik yang ada di Indonesia. Karena salah satu dari fungsi partai politik yaitu melaksanakan pendidikan politik. Pendidikan politik sangat penting

---

<sup>19</sup> Abunawar Basyeban. 2019. Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Pasca Dalam Memberikan Pendidikan Politik Berupa Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Simbur Cahaya*. Vol. 26. No 2. Hal 273-287.

dilakukan agar masyarakat menjadi cerdas dalam perpolitikan. Salah satu partai yang gencar melaksanakan pendidikan politik adalah PKB di Kabupaten Padang Pariaman.

“Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pendidikan politik sebanyak 4-5 kali dalam satu tahun. Pendidikan politik yang diberikan PKB dengan cara seminar kepada masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat di tempat yang telah disediakan. Pendidikan politik juga dilakukan melalui pertemuan dengan pimpinan pesantren yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang UU kepesantrenan yang bertujuan untuk keberlangsungan pesantren kedepannya di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu para kader dari PKB juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pada saat kunjungan kerja untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pemahaman tentang politik sangat penting”.<sup>20</sup>



Pendidikan Politik dilaksanakan oleh semua partai yang ada di Kabupaten Padang Pariaman salah satunya yaitu oleh PKB. Pendidikan politik yang dilaksanakan PKB ini dilakukan setiap tahun dengan bermacam cara. Berikut adalah data pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKB di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun satu tahun terakhir yaitu tahun 2021.

**Tabel 1.1**

**Pelaksanaan Pendidikan Politik PKB tahun 2021 di Kabupaten Padang Pariaman**

No	Tanggal	Lokasi	Cara	Materi
1	5 Juni Tahun 2021	RM Butan Sei Saria.	Penyampaian Materi pendidikan politik oleh ketua DPC PKB dan Diskusi bersama masyarakat	Rapat kordinasi persiapan muscab, dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik partai PKB di Kabupaten Padang Pariaman
2	26 September Tahun 2021	Joyo Makmur Pariaman	Workshop	Kegiatan Workshop dalam rangka sosialisasi UU no 18 tahun 2019 tentang pesantren

<sup>20</sup> Wawancara dengan Tuanku Ali Basar Sutan Sinaro Ketua Dewan Syuro PKB Padang Pariaman pada tanggal 27 Desember 2021 di DPC PKB Padang Pariaman.

				dalam menunjang kegiatan pendidikan politik
3	27 Oktober Tahun 2021	Hotel Axana Padang	Workshop	Kegiatan Workshop dalam rangka muscab DPC PKB Kabupaten Padang Pariaman Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik
4	20 November Tahun 2021	Bisati Sei Sariak	Sosialisasi	Sosialisasi program kerja DPC PKB Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka meninjang kegiatan pendidikan politik

*Sumber: Arsip PKB Laporan Pertanggungjawaban Periode Januari-Desember 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya PKB melaksanakan pendidikan politik sebanyak empat kali dalam setahun. Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran bagi warga negara. Dari dulu kita telah di berikan pendidikan dan arti penting politik baik di lingkungan sekolah, keluarga dan sosial karena pemahaman politik tidak hanya sekedar memilih calon saja tetapi mempunyai arti yang luas dan banyak makna bagi kehidupan masyarakat

“Pendidikan politik yang diberikan PKB sangat berdampak kepada partai, karna pendidikan politik itu terdapat penambahan jumlah kursi dan suara PKB dari tahun ke tahun, selain itu PKB juga dikenal luas oleh masyarakat Padang Pariaman oleh karena itu PKB gencar melakukan pendidikan politik di Padang Pariaman terutama pada pesantren dan masyarakat Padang Pariaman saat ini sudah mulai sadar dari arti penting politik, ini adalah efek dari pelaksanaan pendidikan politik”.<sup>21</sup>

**Tabel 1. 2**

**Perolehan Kursi Partai di DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 Dan 2019**

No	Nama Partai	2014	2019
1	PKB	4	4
2	GOLKAR	4	4
3	NASDEM	5	3

<sup>21</sup> Wawancara dengan Tuanku Afredison Ketua PKB Padang Pariaman pada tanggal 27 Desember 2021 di DPC PKB Padang Pariaman.

4	GERINDRA	4	7
5	HANURA	4	2
6	DEMOKRAT	4	4
7	PKS	4	4
8	PAN	2	6
9	PPP	4	4
10	PDIP	4	2
11	PKPI	1	

*Sumber: Diolah peneliti, 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadinya penambahan kursi dan pengurangan kursi oleh PKB di DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014 dan 2019 di tiap dapilnya. Jumlah kursi yang diperoleh pada setiap pemilunya tetap. Penambahan kursi terjadi pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019. Pada tahun 2014 PKB tidak mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan pada tahun 2019 mendapatkan satu kursi.



**Tabel 1.3**

**Perolehan kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dan 2019 Dapil II Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman**

No	Nama Partai	2014	2019
1	GOLKAR	1	1
2	NASDEM	1	
3	DEMOKRAT	1	1
4	GERINDRA	1	2
5	PPP	1	
6	PBB	1	
7	PAN	1	1
8	PKB		1
9	PKS		1

*Sumber: Diolah peneliti, 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat PKB mendapatkan kursi pada tahun 2019 untuk DPRD provinsi. Fungsi penting pendidikan politik yang diberikan partai politik adalah membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik suatu negara. Karena partai politik adalah suatu lembaga yang dekat untuk merangkul masyarakat. Pendidikan politik oleh partai politik tidak hanya untuk memberantas minat masyarakat yang minim terhadap perkembangan politik dalam negeri tetapi juga membuat masyarakat cerdas dalam kontes politik.

Pendidikan politik oleh partai juga untuk menuntut para kader partai untuk memiliki kompetensi yang berkualitas dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami arti penting dari politik. PKB termasuk salah satu partai yang sangat gencar melaksanakan pendidikan politik. Partai ini melakukan empat kali melaksanakannya dalam satu tahun. Salah satu pendidikan politik yang diberikan PKB ini adalah pembahasan UU No 18 Tahun 2019 tentang pesantren, 16 dari 25 pengurus pesantren di Kabupaten Padang Pariaman ikut hadir dalam pembahsan tersebut.

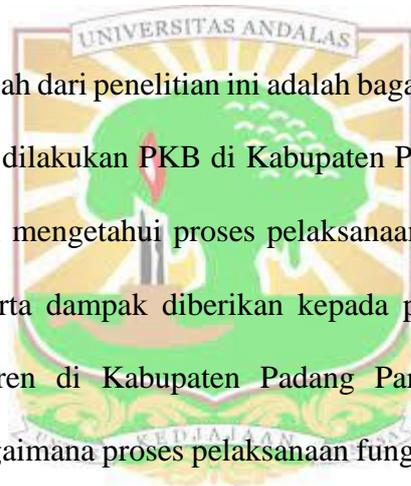
Ketua PKB Tuanku Afredison menjelaskan bahwa UU dan Perpres ini menjadi acuan untuk pengembangan pesantren kedepannya. Ada forum yang mewadahi lahirnya Perda, sehingga pesantren bisa diperhatikan maksimal oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tuanku Afredison juga menyebutkan bahwa keterwakilan dirinya di dapil IV DPRD kabupaten Padang Pariaman tidak lepas dari dukungan pesantren dan surau yang ada di daerah tersebut.<sup>22</sup>

Selain itu penambahan jumlah sura dari pelaksanaan pendidikan politik dirasakan oleh Firdaus kader PKB yang saat ini menduduki kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Salah satu pelaksanaannya yaitu dengan melakukan pendidikan politik dengan cara simpatik tatap muka. Firdaus mengaku, tidak lebih dari 60 juta dia gelontarkan untuk operasional dirinya dan tim saat pemilu. Sebanyak 20 juta digunakan untuk mencetak alat peraga kampanye sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik. Dengan cara simpatik tatap muka tersebut Firdaus dan jaringan organisasi cukup efektif meraup suara.

---

<sup>22</sup> <https://minangkabaunews.com/ketua-fraksi-pkb-dprd-padang-pariaman-afredison-gelar-tasyakuran-uu-pesanten-bersama>. Diakses tanggal 23 Mei 2022. Pukul 22.05 WIB.

Debut politik Firdaus dimulai sejak tahun 2014 dengan menjadi calon anggota DPRD Padang Pariaman di Pemilu tahun 2014. Pada saat itu Firdaus hanya memperoleh 475 suara, namun surunya melonjak pada Pemilu tahun 2019 saat mencalon sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan berhasil mendapatkan 4.563 suara. Pengaruh dari pendidikan politik yang dilakukan sangatlah besar sehingga membuat besarnya dukungan dari masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman oleh karena itu Firdaus berhasil mendapatkan kursi dan sukses menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.<sup>23</sup>



Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan PKB di Kabupaten Padang Pariaman berbasis pesantren, peneliti ingin mengetahui proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh PKB serta dampak diberikan kepada pesantren dari pendidikan politik berbasis pesantren di Kabupaten Padang Pariaman. Pertanyaan pada penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang diberikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019-2022 dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan tersebut?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan fungsi pendidikan politik berbasis pesantren yang diberikan oleh

---

<sup>23</sup> <https://m.radarbangsa.com/news/18074/kisah-caleg-muda-pkb-peraih-kursi-dprd-sumbar-bermodal-rp60-juta>. Diakses tanggal 23 Mei 2022. Pukul 23.15 WIB.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019-2022. Menjelaskan proses pelaksanaan pendidikan politik berbasis pesantren yang diberikan oleh PKB di Kabupaten Padang Pariaman dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan kepada pesantren dari pelaksanaan fungsi pendidikan politik berbasis pesantren yang diberikan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pengetahuan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pendidikan politik PKB dalam memberikan pendidikan politik, bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan para pembaca yang membaca penelitian ini.
2. Secara praktis, diharapkan untuk menjadi referensi tambahan terkait pelaksanaan fungsi pendidikan politik PKB. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus dapat mendorong peneliti lainnya untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini lebih lanjut agar dapat menambah wawasan pengetahuan serta menemukan ide-ide baru yang memiliki bobot relevansi demi kemajuan proses kegiatan pendidikan.

